



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PUSAT

MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan daftar informasi publik Komisi Informasi Pusat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2024
- PERTAMA Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Juli 2024

Rejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Bernard Yuari Putranto

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2024

A. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA									
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Link Website	Pejabat yang Menguasai Informasi	Unit/ PIC yang Menguasai	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Informasi tentang Profil Komisi Informasi Pusat								
1,1	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap, tugas fungsi dan visi misi Komisi Informasi Pusat	<p>I. Kedudukan atau domisili dan alamat lengkap : Alamat : Wisma BSG Gedung Annex Lantai 1/9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat Telp. : 021-34830741 Fax. : 021-3451734 E-mail : sekretariat@komisiinformasi.go.id Website : https://komisiinformasi.go.id/ Twitter : @KIPusat Instagram : @komisiinformasipusat Facebook : Komisi Informasi Pusat Youtube : Komisi Informasi Pusat Tik Tok : Komisi Informasi Pusat</p> <p>II. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan; serta tugas fungsi dan wewenang Komisi Informasi Pusat (Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) A. Tugas: 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 2) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.</p> <p>B. Fungsi: Komisi Informasi Pusat berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.</p> <p>C. Wewenang: Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Pusat memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.</p> <p>III. Visi dan Misi Tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Periode 2022 - 2026 A. VISI "Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam Menjamin Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"</p>	https://komisiinformasi.go.id/v1/profile	Ketua Tim Umum	Tim TIK	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website Media Sosial Majalah BUKA

		<p>B. MISI</p> <p>a). Menyelenggarakan Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan dan Sederhana.</p> <p>b). Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Dan Sumber Daya yang Optimal Dan Profesional Melalui Standarisasi Dan Sertifikasi.</p> <p>c). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Haknya Mendapatkan Informasi Publik Melalui Edukasi Dan Literasi.</p> <p>d). Membangun Insan Komisi Informasi Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Dan Memiliki Integritas Melalui Tata Kelola Sumber Daya, Hubungan Internal, Dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>e). Membantu Pencapaian Sasaran Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan.</p>							
1.2	Profil singkat pimpinan, struktur organisasi, dan gambaran umum satuan kerja (tugas fungsi dan wewenang Sekretariat)	<p>1. Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022 - 2026</p> <p>2. Struktur Komisi dan Sekretariat Komisi Informasi Pusat</p> <p>3. Tugas Fungsi dan Wewenang Sekretariat Komisi Informasi Pusat :</p> <p>Pasal 1</p> <p>Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KI Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.</p> <p>Sekretariat KI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika</p> <p>Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Sekretariat KI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Sekretariat KI Pusat menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. Penyimpanan bahan penyusunan perencanaan dan program;</p> <p>b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;</p> <p>c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan</p> <p>d. Penyiapan bahan dokumentasi dan keputakaan.</p>	https://komisiinformasi.go.id/v1/profile	Ketua Tim Umum	Tim TIK	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	Selama berlaku	Website
1.3	Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisioner dan Pimpinan Komisi Informasi Pusat dalam proses pelaporan LHKPN periode 2023 (tahun Lapor 2024)	https://komisiinformasi.go.id/v3/E-LHKPN	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website
2	Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat								
2.1	Nama program & kegiatan	<p>Informasi Program dan Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 :</p> <p>I. Indeks Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>a. Persiapan Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Evaluasi dan Asistensi terkait Hasil Rekomendasi IKIP</p> <p>II. Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan</p> <p>a. Ajudikasi non litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik Reguler dan Pemilu/Pemilihan</p> <p>b. Penyusunan Regulasi Sengketa Informasi Publik</p> <p>c. Tatakelola Dokumen Berkas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p> <p>d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Persidangan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p> <p>e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>f. Pendalaman Fungsi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap Komisioner</p> <p>III. Badan Publik Pemerintah yang Informatif</p> <p>a. Monev Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik</p> <p>b. Harmonisasi K/L untuk Mengakselerasi Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Kajian dan Publikasi Kelembagaan</p> <p>d. Peningkatan Pengetahuan Badan Publik untuk Mendorong Implementasi Keterbukaan</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat-TA-2024	Ketua Tim Perencanaan	Tim Program	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	Website

		<p>IV. Pengawasan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak</p> <p>a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Penyelenggara</p> <p>b. Bimtek dan Publikasi Standar Layanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan</p> <p>V. Layanan Perkantoran</p> <p>VI. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat</p> <p>VII. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat</p> <p>VIII. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat</p>							
2.2	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi	<p>Informasi Penanggung Jawab Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 :</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik</p> <p>2. Program Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</p> <p>3. Program Badan Publik Pemerintah yang Informatif Penanggungjawab dan Pelaksana Program: Komisioner Bidang Kelembagaan</p> <p>4. Program Pengawasan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Penanggungjawab dan Pelaksana Program: Seluruh Komisioner KI Pusat</p> <p>5. Layanan Perkantoran Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>6. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan</p> <p>8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat Penanggungjawab dan Pelaksana Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan</p> <p>9. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Penanggungjawab dan Pelaksana Program: Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>Kontak : Wisma BSG Lantai 9 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat Telp : 021 – 34830741 Fax : 021 – 3451734 Email : sekretariat@komisiinformasi.go.id</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat-TA-2024	Ketua Tim Perencanaan	Tim Program	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	1 tahun	Website
2.3	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	<p>Target Realisasi & Capaian Program Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 sebagai berikut :</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : Nilai Indeks 74</p> <p>2. Program Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 110 Register Diselesaikan</p> <p>3. Program Badan Publik Pemerintah yang Informatif Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 130 Badan Publik Informatif</p> <p>4. Pengawasan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 3 Lembaga diawasi</p> <p>5. Belanja Gaji, Operasional Perkantoran dan Layanan Kesekretariatan Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 1 Layanan</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat-TA-2024	Ketua Tim Perencanaan	Tim Program	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	1 tahun	Website

2.4	Jadwal pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Program & Kegiatan tertuang dalam Kalender Kegiatan Tahun 2024	https://komisiinformasi.go.id/pdf/20240606092624-Tampilan%20Kalender%20WEB%202024.pdf	Ketua Tim Perencanaan	Tim Program	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	Website
2.5	Anggaran Program dan Kegiatan meliputi Sumber dan Jumlah	Anggaran Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2024 Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut : 1.Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Anggaran : Rp. 7.018.124.000 2.Program Sengketa Informasi Publik yang diselesaikan Anggaran : Rp. 2.884.613.000 3.Program Badan Publik Pemerintah yang Informatif Anggaran : Rp. 5.418.587.000 4.Program Pengawasan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Anggaran : Rp. 2.602.533.000 5.Belanja Gaji, Operasional Perkantoran dan Layanan Kesekretariatan Anggaran : 26.692.607.000	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Ringkasan-Informasi-Tentang-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat-TA-2024	Ketua Tim Perencanaan	Tim Program	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	Website
2.6	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat	Jadwal Pelaksanaan Program & Kegiatan Komisi Informasi Pusat terinci pada dokumen Kalender Kegiatan Tahun 2023	https://komisiinformasi.go.id/pdf/20240606092624-Tampilan%20Kalender%20WEB%202024.pdf	Ketua Tim Perencanaan	Tim Program	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	Website
2.7	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	1. Syarat Pendaftaran Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : 1. Identitas Pemohon a) Pemohon Individu (Lampirkan KTP) b) Pemohon Badan Hukum (Lampirkan SK Kumham dan Akta Pendirian) c) Pemohon Kelompok Masyarakat (Lampirkan Surat Kuasa) 2. Berkas Permohonan Kepada Badan Publik a) Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik b) Surat Jawaban dari Badan Publik (Apabila Ada) c) Surat Keberatan d) Surat Jawaban Keberatan (Apabila Ada) 2. Syarat Pendaftaran Permohonan Informasi Publik : a. Formulir Permohonan b. Identitas Pemohon c. Surat Kuasa (apabila Pemohon menerima kuasa) d. AD ART yang sudah disahkan oleh KumHAM (untuk Pemohon Badan Hukum)	https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanisme-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID Ketua Tim Hukum/PSI	PPID Tim Hukum/PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	Selama berlaku	Website
3 Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Komisi Informasi Pusat									
3.1	Ringkasan Kinerja/ Kegiatan Tahun 2017 s.d. 2023	Kegiatan yang telah dilaksanakan termuat dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 s.d. Tahun 2023	https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-tahunan	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website
4 Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit									
4.1	Rencana dan laporan realisasi anggaran	1. Laporan Realisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 s.d. 2023 2. Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d. 2023 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan/ Perencanaan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website (Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat)
4.2	Neraca	Neraca Komisi Informasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d. 2023	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website (Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat)
4.3	Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d. 2023	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website (Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat)

4.4	Daftar aset dan inventaris (Barang Milik Negara)	Daftar aset dan inventaris Komisi Informasi Pusat termuat Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d. 2023	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	5 tahun	Website (Daftar Barang Milik Negara (BMN) Asset Sekretariat Komisi Informasi Pusat)
5 Ringkasan laporan akses Informasi Publik									
5.1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	<p>Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024</p> <p>- Semester I Jumlah yang diterima : 13 permohonan</p> <p>Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan PPID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023</p> <p>- Triwulan I Jumlah yang diterima : 8 permohonan</p> <p>- Triwulan II Jumlah yang diterima : 24 permohonan</p> <p>- Triwulan III Jumlah yang diterima : 1 permohonan</p> <p>- Triwulan IV Jumlah yang diterima : 1 permohonan</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	PPID	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	5 tahun	Website (Informasi Layanan Publik)
5.2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	<p>Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024 adalah 10 hari kerja</p> <p>Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan PPID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 adalah 10 hari kerja</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	PPID	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	5 tahun	Website (Informasi Layanan Publik)
5.3	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	<p>Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024</p> <p>- Semester I Jumlah yang dikabulkan : 11 permohonan Jumlah yang ditolak : 2 permohonan</p> <p>Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan PPID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023</p> <p>- Triwulan I Jumlah yang dikabulkan : 3 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada</p> <p>- Triwulan II Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada</p> <p>- Triwulan III Jumlah yang dikabulkan : 5 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada</p> <p>- Triwulan IV Jumlah yang dikabulkan : 5 permohonan Jumlah yang ditolak : 1 permohonan</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat</p> <p>https://komisiinformasi.go.id/read/12/09/2023/Daftar-Produk-Hukum-Komisi-Informasi-Pusat</p>	PPID	PPID	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	5 tahun	Website (Informasi Layanan Publik)
6 Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat									
6.1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan di Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Rancangan-Peraturan-Komisi-Informasi-Pusat-Tahun-2024	Ketua Tim Hukum/PSI	Tim Hukum/PSI	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy</i>	1 tahun	Website
		Daftar Peraturan perundang-undangan, putusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Komisi Informasi Pusat terdiri atas :	https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanismes-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik						

6,2	Daftar Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	1. Peraturan Komisi Informasi 2. Putusan Komisi Informasi Pusat 3. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat 4. Yurisprudensi sebagaimana termuat pada Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Informasi Pusat	https://jdih.komisiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum/PSI	Tim Hukum/PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	Selama berlaku	Website JDIH
7 Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik									
7,1	Tata cara memperoleh Informasi Publik	<p>Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui surat, fax, e-mail, telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPID Komisi Informasi Pusat; 2. Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi; 3. Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi; 4. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan; 5. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor register permintaan dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak. - Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. - Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan). - Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. <p>- Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.</p> <p>- Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan.</p> <p>- Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.</p> <p>Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.</p>	https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	PPID	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy</i>	Selama berlaku	Website
7,2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	<p>A. Tata cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik; b. tidak disediakan Informasi berkala; c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik; d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi 45 Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini. 2). Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik dengan datang langsung atau tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan mengisi formulir keberatan. 3). Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; c. tujuan penggunaan Informasi Publik; d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; e. alasan pengajuan keberatan. 4). Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diregisternya pengajuan keberatan tersebut. 5). Jika Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan dari Atasan PPID, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan keberatan dapat mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi Pusat. 	https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Mekanisme-Pendaftaran-Sengketa-Informasi-Publik https://komisiinformasi.go.id/images/berita/20220210015355-Alur%20Keberatan.jpg	Ketua Tim Hukum/PSI	PPID Tim Hukum/PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy</i>	Selama berlaku	Website

8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Komisi Informasi Pusat									
8,1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Komisi Informasi Pusat	<p>Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Komisi Informasi Pusat jika terjadi dugaan pelanggaran.</p> <p>Komisi Informasi Pusat dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat :</p> <p>Email : kodeetik@komiinformasi.go.id atau lapor.go.id Faximile : 021 - 34830741 Surat : Diturunkan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, Wisma BSG Lt. 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Tanah Abang, Jakarta Pusat</p>	https://www.lapor.go.id/instansi/komisi-informasi-publik	Ketua Tim Humas	Admin Lapor	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	Selama berlaku	Website Website LAPOR!	
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa									
9,1	Pengumuman pengadaan barang dan jasa	Pengumuman dan informasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Aplikasi SIRUP	https://komiinformasi.go.id/pdf/20240606093005-SIRUP%202024.pdf	Ketua Tim Umum	Tim Pengadaan	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	1 tahun	Website	
10	Informasi tentang ketenagakerjaan									
10,1	Statistik Kepegawaian Komisi Informasi Pusat	Data statistik Komisi Informasi Pusat terdiri atas : 1. Komposisi SDM Komisi Informasi Pusat berdasarkan Jabatan 2. Komposisi SDM Komisi Informasi Pusat berdasarkan Jenis Kelamin 3. Komposisi SDM Komisi Informasi Pusat berdasarkan Status Kepegawaian	https://komiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Statistik-Kepegawaian-Komisi-Informasi-Pusat	Ketua Tim Umum	Kepegawaian	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website	

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT									
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Link Website	Pejabat yang Menguasai Informasi	Unit/ PIC yang Menguasai	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Daftar Informasi Publik								
		Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Pusat yang meliputi Informasi Berkala dan Informasi yang tersedia Setiap Saat	https://komiinformasi.go.id/read/16/03/2022/Daftar-Informasi-Publik-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	PPID	2020, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website
2	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Komisi Informasi Pusat								
2,1	Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat	Berisi Daftar Peraturan, Keputusan, Edaran dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat tertuang dalam JDH	https://komiinformasi.go.id/read/12/09/2023/Daftar-Produk-Hukum-Komisi-Informasi-Pusat https://jdih.komiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum/PSI	Tim Hukum/PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
2,2	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	Dokumen Peraturan, Keputusan, Edaran dan/ atau Kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat	https://komiinformasi.go.id/read/12/09/2023/Daftar-Produk-Hukum-Komisi-Informasi-Pusat https://jdih.komiinformasi.go.id/	Ketua Tim Hukum/PSI	Tim Hukum/PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan								
3,1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Pedoman pengelolaan yang terdiri dari : 1. Perki Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat; 2. Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 10/KEP/KIP/XII/2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Informasi Pusat.	https://komiinformasi.go.id/read/12/09/2023/Daftar-Produk-Hukum-Komisi-Informasi-Pusat https://jdih.komiinformasi.go.id/dokumen/view?id=72	Ketua Tim Umum Ketua Tim Hukum/PSI	Tim Umum Tim Hukum/PSI	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website Buku

3,2	Profil Pimpinan dan Pegawai	1. Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026 2. Kepegawaian Sekretariat Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Komisioner-KI-Pusat-2022-%E2%80%93-2026	Ketua Tim Umum	Kepegawaian	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
3,3	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus pada unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya	Anggaran Komisi Informasi Pusat secara umum tertuang dalam DIPA dan secara khusus termuat dalam RKAKL dan Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Keuangan	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website
3,4	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	1. Data statistik permohonan informasi publik sebagaimana termuat dalam Laporan Layanan PPID KI Pusat 2. Data Statistik Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat 3. Data Kepegawaian Komisi Informasi Pusat 4. Data Statistik IKIP 5. Data Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik	https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat https://komisiinformasi.go.id/read/20/06/2024/Statistik-Program-Komisi-Informasi-Pusat-Tahun-2023	Ketua Tim Umum Ketua Tim Hukum/PSI PPID	Kepegawaian PPID TA Kelembagaan TA Litdok	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun Selama berlaku	Website Buku IKIP
4 Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga									
4,1	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga	Surat-Surat perjanjian atau MoU dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/v2/kerjasama	Ketua Tim Humas	Tim Humas	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
5 Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi Informasi Pusat									
5,1	Rekapitulasi surat menyurat pimpinan	Agenda surat menyurat Pimpinan Komisioner dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang meliputi : 1. Agenda surat masuk 2. Agenda surat keluar 3. Nota dinas sebagaimana tersimpan dan dikelola pada arsip TU dan Sekretaris Pimpinan Komisi Informasi Pusat	--	Ketua Tim Umum	Persuratan TU Pimpinan	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	--
6 Data perbendaharaan atau inventaris									
6,1	Daftar rekapitulasi perbendaharaan atau inventaris aset	Daftar aset dan inventaris Komisi Informasi Pusat sebagaimana termuat dalam Laporan Barang Milik Negara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Admin BMN	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website (Daftar Barang Milik Negara (BMN) Asset Sekretariat Komisi Informasi Pusat)
7 Rencana strategis dan rencana kerja Komisi Informasi Pusat									
7,1		Rencana strategis dan rencana kerja Komisi Informasi Pusat 2022-2026	https://komisiinformasi.go.id/pdf/20230306095053-RENSTRA%20KOMISI%20INFORMASI%20PUSAT%202022-2026_1.pdf https://komisiinformasi.go.id/read/01/07/2024/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website
8 Agenda Pimpinan Satuan Kerja									
8,1		Agenda kerja Pimpinan Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari : 1. Agenda kegiatan Komisioner 2. Agenda kegiatan Sekretaris	--	Ketua Tim Umum	TU Pimpinan Sekretaris	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	--
9 Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik									
9,1		Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang meliputi kegiatan menjawab Permohonan Informasi, penyusunan Laporan Layanan PPID, dan dokumentasi Pelayanan PPID termuat dalam : 1. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 2. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 3. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2021 4. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 5. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2023	https://komisiinformasi.go.id/read/03/04/2024/Layanan-PPID-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	PPID	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website (Informasi Layanan Publik)
10 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya									
10,1		Rekapitulasi pelanggaran dan disiplin PNS dan PPPK Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari : 1. Pelanggaran Disiplin Berat 2. Pelanggaran Disiplin Sedang 3. Pelanggaran Disiplin Ringan	--	Ketua Tim Umum	Kepegawaian	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	--

11	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya								
11,1		Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	--	Ketua Tim Umum	Kepegawaian	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	1 tahun	--
12	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat								
12,1		Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat antara lain : 1. Laporan dan Buku IKIP Tahun 2021, 2022 dan 2023 2. Jurnal Keterbukaan Informasi Publik	https://komisiinformasi.go.id/v4/pustaka	Komisioner Kelembagaan Komisioner Litdok	TA Kelembagaan TA Litdok	2020; 2021; 2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	2 tahun	Website Buku IKIP Jurnal BUKA
13	Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya								
13,1		Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan Komisi Informasi Pusat beserta kajian akademiknya	--	Komisioner Reglik	TA Reglik	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	2 tahun	--
14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum								
14,1		Informasi dan kebijakan yang disampaikan melalui pemberitaan, press release dan sosialisasi	https://komisiinformasi.go.id/	Tim Humas/ Medsos	Tim Humas/ Medsos	2024, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy</i>	Selama berlaku	Website Media Sosial
15	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala								
15,1		Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Pusat yang meliputi Informasi Berkala dan Informasi yang tersedia Setiap Saat	https://komisiinformasi.go.id/read/16/03/2022/Daftar-Informasi-Publik-Komisi-Informasi-Pusat	PPID	PPID	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	2 tahun	Website
16	Informasi tentang standar pengumuman informasi								
16,1		SOP tentang pengumuman informasi yang dikelola oleh Komisi Informasi Pusat yang meliputi : 1. SOP Pengelolaan Media Sosial 2. SOP Pembuatan Rilis 3. SOP Jumpa Pers 4. SOP Wawancara Komisioner	--	Ketua Tim Humas	Tim Humas	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	<i>Softcopy dan hardcopy</i>	Selama berlaku	--

PPID Komisi Informasi Pusat


BERNARD YUARI PUTRANTO